

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A.A Ribeka Martha Purwahita, Putu Bagus Wisnu Wardhana, I Ketut Ardiasa, & I Made Winia. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Pariwisata Bali Ditinjau dari Sektor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*.
- Abdur Rozaki dan Sutoro Eko. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE.
- Amiruddin. (2020). *Otonomi Desa Ditengah Pandemi Covid 19: Senarai kekhawatiran*. In *Hukum dan Politik: Regulasi yang Memuliakan Martabat manusia*.
- Bintarto. (2010). *Desa Kota* (p. 6). Alumni.
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206–213.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Menkeu: Refocusing TKDD Penting Untuk Penanganan Pandemi Covid-19*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-refocusing-tkdd-penting-untuk-penanganan-pandemi-covid-19/>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). *Refocusing Anggaran dan Inovasi Pemerintah Daerah untuk Minimalisir Dampak Pandemi Covid-19*. Ekon.Go.Id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3262/refocusing-anggaran-dan-inovasi-pemerintah-daerah-untuk-minimalisir-dampak-pandemi-covid-19>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. CV Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (2006).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2 (2014).
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 8 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa, (2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, (2019).
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, (2019).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (2020).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, (2020).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, (2020).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, (2022).
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7, 83–85.